

BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan pariwisata pada masa pemerintahan Joko Widodo yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di Indonesia tidak semuanya diturunkan dari ASEAN *Tourism Strategic Plan* yang telah disusun dan disepakati oleh Indonesia sendiri. Pemerintah dalam membuat kebijakan pariwisata melalui Rencana Strategis (Renstra) seringkali tidak taat (*comply*) dengan arahan strategis (*strategic directions*) yang ada pada ATSP. Berdasarkan pada analisa dan data yang ada pada bab-bab sebelumnya yang berangkat dari pertanyaan mengenai **“Mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan *compliance* secara utuh terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* 1 dan 2 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2019?”**, dapat disimpulkan faktor apa saja yang menghambat Indonesia dalam melakukan *compliance* terhadap arahan strategis dari ATSP pertama dan kedua, dan apa hal yang masih mendorong Indonesia untuk tetap mengadopsi beberapa poin ATSP yang mendorong ASEAN *Integration* secara implisit (tidak secara langsung). Setidaknya dua hal yang menghambat Indonesia untuk melakukan *compliance* (satu hal mayor dan satu hal minor) setelah dianalisa menggunakan teori *compliance* milik Lutmar dan Carnerio, serta sedikit dukungan teori *economic integration* melalui *economic arrangement* oleh Eduard Marinov. Meski begitu ada satu hal yang mendorong Indonesia untuk tetap melakukan *compliance* terhadap ATSP

tahap 1 dan 2. Pemerintah Indonesia tidak melakukan *compliance* secara utuh terhadap ATSP 1 dan 2 karena adanya hambatan-hambatan berikut:

Pertama, hambatan terbesar sekaligus hambatan eksternal adalah sikap normatif ASEAN sejak pertama kali berdiri pada tahun 1967 dan tidak adanya *role of enforcement* menjadi sebab utama tidak berjalannya ATSP secara maksimal. Indonesia memiliki regulasi yang kompleks terkait dengan regulasi terutama soal tenaga kerja, dan MRA-TP memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ASEAN sendiri tidak memiliki regulasi alternatif untuk rujukan dan tidak bisa mencampuri urusan domestik suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lutmar dan Carnerio dalam teori *compliance*-nya bahwa persetujuan dari sebuah perjanjian maupun kesepakatan harus diiringi dengan adanya paksaan (*enforcement*) supaya dapat ditaati secara penuh dengan komitmen. Tanpa adanya *role of enforcement* dan kehadiran organisasi secara konkret dalam bentuk hukum maka Indonesia juga tidak akan melakukan *compliance* secara maksimal. Supaya suatu negara dapat melakukan *compliance* secara utuh dan mencapai efektivitas yang maksimal dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, dibutuhkan sikap tegas dan instrumen yang ‘memaksa’ setiap negara anggota organisasi internasional untuk patuh. Hukuman dalam bentuk sanksi ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk mencapai ASEAN *Economic Integration* yang menjadi salah satu tujuan besar dari dibentuknya ATSP apabila merujuk pada pandangan Eduard Marinov. Sikap normatif ASEAN ini juga ditunjukkan dengan fakta bahwa tidak semua negara di Asia Tenggara mengimplementasikan ATSP dengan baik dan maksimal. Negara yang belum mengoptimalkan *compliance* terhadap ATSP adalah Indonesia,

Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Dan negara yang telah mengadopsi ATSP ke dalam rencana strategis nasional masing-masing negara anggota untuk mencapai integrasi pariwisata di ASEAN secara menyeluruh adalah Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Hal ini menandakan bahwa sikap normatif ASEAN berimbas tidak hanya di Indonesia saja, namun juga pelaksanaan *strategic plans* di negara anggota ASEAN yang lain. Apabila organisasi terus bersikap normatif, maka tujuan dari kesepakatan yang telah dibuat menjadi sulit untuk bisa dicapai dengan maksimal.

Kedua, hambatan juga datang dari dalam Indonesia, dimana pemerintah cenderung ambigu dalam mengambil peran di dalam ASEAN. Pada bab 2 telah dijelaskan pula oleh sebuah *critical review* dari Felix Heiduk bahwa sikap Indonesia mengenai MRA-TP dan sistem *single visa* menunjukkan arah prioritas yang berbeda dari pemerintah Indonesia, yang lebih mengutamakan kebijakan domestic dibandingkan kebijakan terhadap ASEAN dan kebijakan yang diturunkan dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pada tingkat regional. Hal yang mendorong sikap pemerintah untuk tidak *comply* terhadap poin-poin ATSP adalah bentrohnya terhadap regulasi Indonesia seperti yang telah dibahas juga pada bab 3, ditambah dengan tidak adanya tekanan dari ASEAN itu sendiri.

Meskipun terdapat hambatan dari ASEAN dan dari pemerintah Indonesia sendiri dalam melakukan *compliance* terhadap ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP), ada sebuah prinsip di Asia Tenggara yang telah terbangun sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, yaitu prinsip timbal balik (*reciprocity*). Menurut Lutmar dan Carnerio, *reciprocal mechanism* terjadi apabila tidak ada kekuatan substansif

yang lebih dominan di dalam suatu kawasan. Pada bab tiga telah dijelaskan bahwa Lutmar dan Carnerio mengatakan bahwa *reciprocal mechanism* akan terus mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk terus bekerja sama. Hal ini bisa terus terjadi karena tidak adanya *dominant power* di Asia Tenggara . Namun sikap *reciprocal* ini hanya akan mendorong Indonesia untuk menandatangani ATSP sebagai formalitas saja, tanpa ada implementasi yang konkret dalam Renstra untuk mencapai tujuan besar ATSP yaitu integrasi pariwisata sebagai bagian dari proses integrasi ekonomi melalui *economic arrangement* di Asia Tenggara. Indonesia dan negara anggota lainnya di Asia Tenggara tetap membutuhkan ketegasan dari ASEAN dalam bentuk instrumen *enforcement* untuk dapat mengaplikasikan dan *comply* terhadap ATSP dengan serius. Apabila tidak ada ketegasan dari ASEAN dalam bentuk instrumen-instrumen *enforcement*, maka Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya akan terus terhambat dalam melakukan *compliance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ASEAN. 2015. *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*. Manila: the Philippine Department of Tourism as Lead Coordinator for the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025.
- To, Honson. 2018. *ASEAN Business Guide: The Economies of ASEAN and the Opportunities they present*. Bangkok.
- Slaughter, Anne-Marie. 2014. *Regional and Global Cooperation In ASEAN, PRC, and India: The Great Transformation*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Lutmar, Carmela, Cristiane L. Carneiro, dan Sara McLaughlin Mitchell. 2016. *Formal Commitments and States' Interests: Compliance in International Relations*. London.
- Marinov, Eduard. 2014. *Economic Integration Theories and Developing Countries*. South-east Europe: Infusing Research and Knowledge.
- World Tourism Organization and Tourism Australia. 2013. *Key Outbound Tourism Markets in South-East Asia – Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam*. Madrid: UNWTO.
- Sandell, Terry, dan Lila Skarveli. 2016. *Mapping Exercise: How Could Creative Industries Foster Innovation in Tourism in the Northern Dimension Area?*. Berlin.
- Kristianto, Yohanes. 2019. *ASEAN Common Visa as the "ASEAN-Schengen"*. Jakarta.
- UNWTO. 2000. *Tourism Highlights 2000*. Madrid: United Nations World Tourist Organization.
- Kementerian Pariwisata RI, 2015. *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- United Nations. 2010. *Promoting Foreign Investment in Tourism*. New York dan Geneva: UNCTAD.

- Ministry of Primary Resources and Tourism. 2018. *Tourism Industry 2018: Towards Brunei Wawasan 2035*. Ministry of Primary Resources and Tourism.
- Hoang, Anh-Duc, dan Son Ho. 2013. *Vietnam National Branding in Tourism Marketing*. Hanoi: Vietnam Tourism Marketing Strategy to 2020 & Action Plans.
- The Ministry of Tourism and Sports Thailand. 2017. *The Second National Tourism Development Plan 2017-2021*. Bangkok: The Ministry of Tourism and Sports.
- Intal, Ponciano. 2012. *ASEAN and Member States: Transformation and Integration*, volume 3. Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Menont, Jayan, Laurence Todd, dan Darmashakthini Arujunan. 2015. *ASEAN Integration Report*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Jurnal

- Slaughter, Anne-Marie, Andrew S. Tulumello, dan Stepan Wood. 1998. "International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship". *The American Journal of International Law* 92, no. 3.
- Simmons, Beth. 2010. "Treaty Compliance and Violation." *Annual Review of Political Science*, vol. 13.
- Moenir, Haiyyu Darman. 2017. "Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi." *Andalas Journal of International Studies*, vol. 6.
- Alfiarnika, Vetty. 2017. "Tingkat Compliance Indonesia Terhadap Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan I (ATSP 1)."
- Heiduk, Felix. 2016. "Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity." *SWP Research Journal*, vol. 6.
- Amalia, Lady. 2016. "Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5.
- Lunenburg, Fred. C. 2012. "Compliance Theory and Effectiveness and Organization." *International journal of scholarly academic intellectual diversity*, vol. 14.

- Nottage, Luke, Justin Malbon, Jeannie Paterson, and Caron Beaton-Wells. 2019. "Theoretical Perspectives on ASEAN and Consumer Law Developments." *Journal of Integration through Law: The Role of Law and the Rule of Law in ASEAN Integration*.
- Majeski, Stephen J., dan Shane Fricks. 1995. "Conflict and Cooperation in International Relations", *The Journal of Conflict Resolution* 39, no. 4.
- Wong, Emma P.Y., Nina Mistilis, Larry Dwyer. 2011. "A Model of ASEAN Collaboration." *Journal of Tourism Research*.
- Fresha, Florensia. 2020. "Analisis Implementasi Strategic Direction 2 dalam ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015 Oleh Thailand."
- Petri, Peter, Michael Plummer, dan Zhai Fan. 2010. "The Economics of the ASEAN Economic Community."
- Menont, Jayan, Laurence Todd. 2015. Darmashakthini Arujunan. "ASEAN Integration Report." *ASEAN Prosperity Initiative* no. 14.
- Lickorish, Leonard J., 1997. "an Introduction to Tourism." *British Library Cataloguing in Publication Data*.
- ASEAN. 2019. "ASEAN Economic Integration Brief 2019." *ASEAN Economic Integration Brief* no. 5.
- Heiduk, Felix. 2016. "Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity." *SWP Research Journal*, vol. 6.
- Suzuki, Sanae. 2019. "Why is ASEAN not intrusive? Non-interference meets state strength." *Journal of Contemporary East Asia Studies* no. 8 vol. 2. DOI: 10.1080/24761028.2019.1681652
- Prabandari, Atin M.A. 2015. "Implementasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals." *Journal of International Political Economy and Development*.
- Kristianto, Yohanes. 2019. ASEAN Common Visa as the "ASEAN-Schengen." *Future Perspectives to Develop Southeast Asia*.
- Pickel-Chevalier, Sylvine dan Budarma Ketut. 2016. "Towards Sustainable Tourism in Bali." *Deuxième partie – Évolution des lieux et des territoires* no. 2.

- Jones, David, dan Michael Smith. 2007. "Making Process, Not Progress: ASEAN and the Evolving East Asian Regional Order." *International Security* Vol. 32.
- Narine, Shaun. 2009. "ASEAN in the twenty-first century: a sceptical review." *Cambridge Review of International Affairs* No. 22 Vol. 3.
- He, Jiajie. 2016. "Normative Power in the EU and ASEAN: Why They Diverge." *International Studies Review* Vol. 18.
- Williams, Carrie. "Research Methods." *Journal of Business and Economic Research* Vol. 5 (Maret 2007).

Internet

- ASEAN. *A Journey towards regional economic integration 1967-2017*. Diakses 16 Oktober 2019. <https://asean.org/storage/2017/09/ASEAN-50-Final.pdf>.
- Dokumen ASEAN. *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments*. Diakses 17 Oktober 2019. https://asean.org/?static_post=the-1987-asean-agreement-for-the-promotion-and-protection-of-investments.
- ASEAN. ASEAN Tourism Agreement, Diakses 20 Oktober 2019. https://asean.org/?static_post=asean-tourism-agreement.
- Dokumen ASEAN. *Handbook ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism*, Diakses 18 Oktober 2019. https://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf.
- ASEAN. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professional*, Diakses 20 Oktober 2019. https://www.asean.org/storage/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf.
- Dokumen ASEAN. *ASEAN Tourism Crisis Communications Manual*. Diakses 25 Oktober, 2019. https://www.asean.org/storage/2016/01/publications/ASEAN_Tourism_Crisis_Communication-2015.pdf.
- Kusnandar, Viva Budy. *Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi*. Diakses 25 Oktober 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/12/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-menjadi-16-ribu>.

Indonesia Brief. Diakses 26 Oktober 2019.
<http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-member-states/view/709/newsid/793/indonesia.html>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat.* Diakses 26 Oktober 2019.
<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>.

Profil Investasi di Indonesia. Diakses 26 Oktober 2019.
<http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-member-states/view/709/newsid/793/indonesia.html>.

Asian Financial Crisis in Indonesia. Diakses 26 Oktober 2019.
<https://www.indonesia-investments.com/culture/economy/asian-financial-crisis/item246>.

Indonesia Investments. *Culture of Indonesia.* Diakses 30 Oktober 2019.
<https://www.indonesia-investments.com/culture/item8>.

Detik Finance. *Visit Indonesia 2008, Jumlah Turis Naik 15,68%.* Diakses 30 Oktober 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-933022/visit-indonesia-2008-jumlah-turis-naik-1568>.

Bank Dunia, *Profil Indonesia.* Diakses 30 oktober 2019.
<https://data.worldbank.org/country/indonesia>.

Indonesia Investments. *Produk Domestik Bruto Indonesia.* Diakses 30 Oktober 2019. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>.

